

Studi pemikiran tata negara di Indonesia: penerapan konstitusi RIS di Negara Indonesia Timur 1946-1950 = Study of constitutional perspective in Indonesia the implementation of konstitusi RIS in the state of East Indonesia 1946-1950 /

A. Lili Evita

A. Lili Evita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20454283&lokasi=lokal>

---

Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

AbstrakKajian tentang federalisme dan Konstitusi RIS di Indonesia belum mendapat tanggapan positif baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa federalisme merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan dari bentuk kolonialisme baru Belanda di Indonesia pada masa awal kemerdekaan tahun 1945. Tulisan ini akan mengkaji penerapan sistem federalisme di Negara Indonesia Timur, yang ditujukan untuk mengangkat hal-hal positif pada sistem federalisme yang nantinya dapat digunakan untuk mengkaji ulang sistem otonomi daerah. Negara Indonesia Timur pada tahun 1946-1950 berada dalam dua persimpangan revolusi, satu sisi revolusi dari kaum republik dan pada sisi lainnya revolusi dari kaum federal. Keduanya, merupakan bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam melepaskan diri dari dominasi dan penguasaan bangsa Asing. Metode sejarah melalui penelusuran sumber arsip dan surat kabar sezaman menjadi landasan utama penulis dalam merekonstruksi peristiwa pada saat itu. Hasilnya ditemukan bahwa pada masa revolusi, di bawah sistem federalisme NIT memperoleh titik balik kejayaan ekonominya yang berbanding terbalik dengan kondisi politik yang sedang kacau. Pada masa ini Gubernur Sulawesi Ratulangi ditangkap dan diasingkan di Serui, Papua. NIT berhasil merajut kerjasama ekonomi baik dalam skala regional maupun internasional yang membuat pelabuhan Makassar ramai dengan aktifitas bongkar muat.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The study of federalism and Konstitusi RIS in Indonesia has not received a positive response either among academics or the general public. This relates to the view of federalism as a system which can not be elected from its new form in Indonesia in the early days of independence in 1945. This paper will examine the application of the federalism system in the State of East Indonesia, aimed at raising the positive points on the federalism system that can be used to review the regional autonomy system. The State of East Indonesia in 1946 1950 was in two crossroads of the revolution, one side of the revolution of the republic and on the other side of the federal revolution. Form, is a form of struggle of the people of Indonesia in freedom of self from domination and mastery of the Foreigners. Historical methods through source search and the latest news. At this time the Governor of Sulawesi Ratulangi was arrested and exiled in Serui, Papua. NIT managed to knit the economic cooperation both in regional and international scale that makes the port of Makassar crowded with loading and unloading activities.